

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Literatur

- Amin, Fakhry, Et Al., Ilmu Perundang-undangan, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023.
- Amin, M, *Memahami Keuangan Daerah*, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2017.
- Amrusi, Fahmi, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung, Nusamedia, 2012.
- Ashiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Asshidiqie, Jimly, *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII, Yogyakarta, 2005.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, STAIN Press, Purwokerto, 2010.
- Friedric, Carl, J, *Filsafat Hukum Perspektif Histori*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Hadjon, Philipus, M., *Tentang Wewenang*, Yuridika, Surabaya, 1997.
- Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, PT Indeks, Jakarta, 2007.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kalijarvi, Thorsten, V, dalam Isjwara, Fred, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1974.

- Kamareollah, Agoes, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021.
- Kawedar, Warsito, Rohman, Abdul & Handayani, S., *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Ketut, S, I, Nengah, D, I, dan Gede, F, I, *Paradigma Ergonomi dalam Penerapan Pengelolaan Parkir*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.
- Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia, Depok, 2002.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2008.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- Marzuki, Peter, M, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter, M, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Nasution, M. S, Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Pamuji, Kadar, Et Al., *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Unsoed Press, Purwokerto, 2023.
- Pamuji, Kadar, *Buku Hukum Ajar Pajak*, Unsoed Press, Purwokerto, 2020.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

- Saragih, Juli, P, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Siregar, Baldric, *Akuntansi Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015.
- Soedarga, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Eresco, Bandung, 1964.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Soemitro, Ronny, H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Solibah, Ratna, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2019.
- Solihkin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2021.
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Sulaiman, Alfin, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Syafrie, Inu, K, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 50)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84)

### **C. Jurnal Ilmiah**

Afrida, Nurul, A, Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif *Welfare State* di Indonesia, *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2023.

- Afrida, Nurul, A, Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State di Indonesia, *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Amin, Subhan, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, *El-Afkar*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Andersen, Ditte, Stuck! Welfare State Dependency as Lived Experience, *European Societies* 22, No. 3, 2020.
- Andersen, N dan Stenner, P, How the Welfare State Tries to Protect Itself Against the Law: Luhmann and New Forms of Social Immune Mechanism, *Law and Critique*, Vol. 35, No. 1, 2023.
- Awom, Amiruddin, Purnomo, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Kelancaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Sorong, *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik* Vol. 3, No. 1, 2017.
- Aziz, Fitriyanto dan Widodo, Slamet, Kinerja Simpang Empat Tidak Bersinyal pada Persimpangan Jl. Adisucipto ± Jl KH. Abdurahman Wahid ± Jl. Sungai Durian Laut di Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 1, No. 12, 2016.
- Eka, Y, Mailinda, Nengah, D, Ni, dan Putu, M, Ni, Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam *Ius Constituendum*, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 12, No. 4, 2023.
- Elviandri, Dimiyati, dan Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol.31 No.2, 2019.
- Irawan, Ferry, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, 2017.
- Keladu, Yosef, Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 19 No. 1., 2023.
- Kunarti, Siti, Et Al., Penerapan Asas Freies Ermessen dalam Pengambilan Kebijakan oleh Pemerintah Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023.
- Kiswanto, Eddy. Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengemalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia), *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, Vol. 9 No.2, 2005.



- Nasution, Bahder, J, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Nasution, Bahder, J, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Nasution, E, Hardani, S, dan Munir, A, Akmal, Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Kepau Jaya, Journal of Sharia and Law, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Nawawi dan Sherly, Studi Optimalisasi Perparkiran dan Pedestrian di Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Lampung, Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Pamuji, Kadar, Implikasi Kebijakan "Pendaerahan" Pengelolaan PBB Setelah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 1, 2011.
- Pratama, Pebriansya, Pratama, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol.1, No.2, 2024.
- Rahmawati dan Sutrisno, Edy, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan, Stialana Jurnal, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Rauf, Rahyunir, Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Sasana, Hadi, Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 3, No. 2, 2006.
- Siagian, Ade, O, dan Utama, Andrew, S, Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan PerundangUndangan yang Berkeadilan dan Partisipatif, TIN: Terapan Informatika Nusantara, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Sukmana, Oman, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Jurnal Sospol, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Suparji, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol.4 No.1, 2019
- Suranaya, I, G, Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2016.

Suranaya, I, G, Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 3, 2018.

Suryadi, Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat, Journal of Rural and Development, Vol. 1, No. 2, 2010.

Widjaja, Gunawan, Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata, Jurnal Alwatzikhoebillah, Vol. 9, No. 2, 2023.

#### **D. Media online**

Aji, Trisna, P, 10 Maret 2022, Tarif Parkir di Kota Purwokerto Termurah se-Indonesia, <https://kumparan.com/ruang-dakwah-medis/tarif-parkir-di-kota-purwokerto-termurah-se-indonesia-1xejJNeQBmu/2>, 1 Mei 2025

Badan Pusat Statistik, 26 Februari 2025, Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/en/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah--unit---2023.html>, 1 Mei 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Maret 2025, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas, [https://static.banyumaskab.go.id/website/file/data\\_dan\\_informasi\\_kabupaten\\_banyumas\\_2025\\_200325082600.pdf](https://static.banyumaskab.go.id/website/file/data_dan_informasi_kabupaten_banyumas_2025_200325082600.pdf), 1 Mei 2025

Primadi, Yudha, I, 27 Februari 2025, Karcis Porporasi Parkir Belum Beredar, <https://radarbanyumas.disway.id/read/130481/karcis-porporasi-parkir-belum-beredar>, 1 Mei 2025.

Primadi, Yudha, I, 21 Januari 2025, Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Bakal Naik, <https://radarbanyumas.disway.id/read/128612/tarif-parkir-tepi-jalan-umum-bakal-naik>, 1 Mei 2025

Purnama, Tsabita, I, 25 Juni 2024, Juru Parkir Liar Kian Marak, Dishub Banyumas: Kami Kekurangan Personel, <https://beritaunsoed.com/2024/06/25/juru-parkir-liar-kian-marak-dishub-banyumas-kami-kekurangan-personel/>, 1 Mei 2025

Wahyudi, Amin, 21 April 2025, Parkir Pakai Aplikasi? Bupati Banyumas Siap Realisasikan Gagasan Ketua DPRD, <https://serayunews.com/parkir-pakai-aplikasi-bupati-banyumas-siap-realisasikan-gagasan-ketua-dprd>, 23 April 2025.